Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional

Iin Karita Sakharina

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

E-mail: ik.sakharina@gmail.com

Abstract:

In the global Covid-19 Pandemic era that was attacking the world, all countries in the world felt the impact, so most of the Heads of States had to take and set new policies in their respective countries to break the chain of the spread of this virus which is increasingly massive. Of course, this has an impact on all people who are stay in one country not only the citizens of a country who feel the impact of State policies related to the efforts to terminate and handle Covid-19, but also foreigner who are in a State's territory, it is definitely affected the policy of the State Government. Foreigners residing in a territory of the State include international refugees who currently reside in and spread to almost all countries in the world, both States parties to the 1951 Convention on Refugee Status and States that have not been parties to the 1951 convention commonly referred to as the Transit State. Refugees during this pandemic are the person or groups of people who are most vulnerable to the dangers of covid-19 as well as other impacts on their protection, UNHCR and the States where refugees are located must continue to provide the same protection to international refugees in their countries.

Keywords: Covid-19; Legal Protection; Refugee; International Law; UNHCR

Abstract:

Dimasa Pandemi Global Covid-19 yang tengah menyerang dunia, semua Negara didunia merasakan dampaknya, sehingga sebagian besar Kepala Negara harus mengambil dan menetapkan kebijakan baru di Negara masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini yang semakin hari semakin massif adanya. Tentu hal ini berdampak pada semua orang yang berada dinegaranya tidak hanya warga Negara saja dari suatu Negara yang merasakan dampak dari kebijakan Negara terkait upaya pemutusan dan penanganan Covid-19 ini, namun juga warga Negara asing yang berada di suatu wilayah Negara, sudah pasti merasakan dampak dari kebijakan Pemerintah Negara. Orang asing yang berada disuatu wilayah Negara termasuk para pengungsi internasional yang saat ini berada dan meyebar hampir disebagian Negara-negara didunia, baik itu Negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Negara yang belum menjadi pihak dari konvensi 1951 yang biasa disebut dengan Negara Transit. Tentu saja pengungsi dimasa pandemi ini menjadi orang atau kelompok orang yang paling rentan terhadap bahaya covid-19 juga dampak lain bagi perlindungan terhadapnya, Untuk itu UNHCR bersama Negara-negara dimana pengungsi berada harus tetap memberikan perlindungan yang sama terhadap pengungsi internasional yang berada di negaranya.

Kata Kunci: Covid-19; Perlindungan Hukum; Pengungsi; Hukum Internasional; UNHCR

1. Pendahuluan

Awal tahun 2020 ini dibuka dengan virus Covid -19 yang melanda dunia. Virus yang awalnya hanya berada di salah satu kota di China yaitu Wuhan, akhirnya menyebar ke semua Negara di dunia. Semua Negara di dunia di sibukkan dengan adanya penyebaran virus yang mematikan ini dan belum ada obat serta vaksinnnya. Seketika pandemi besar melanda dunia. Semua Pemimpin Negara- Negara dibuat kalang kabut untuk mengatasi virus ini, dunia tidak siap menghadapi massifnya penyebaran virus ini. Setiap hari berjatuhan korban secara massal, membuat rumah sakit jadi kewalahan. Sekejap kebijakan banyak Negara di dunia berubah. Kepala Negara beserta pemerintahannya dipaksa untuk mengambil kebijakan yang secepat mungkin untuk menghentikan laju dan lonjakan serta penyebaran dari virus ini.

Sejumlah kebijakan yang tidak biasa terus diambil oleh sejumlah kepala Negara di dunia, seperti menutup sekolah, rumah ibadah, tempat-tempat wisata namun tetap saja virus ini belum bisa dihentikan penyebarannya, Negara dipaksa untuk mengambil kebijakan yang lebih extreme lagi yaitu menutup wilayahnya, atau yang disebut dengan lock down. Lock down diberlakukan hampir diseluruh Negara di dunia, yaitu dengan menutup pintu-pintu keluar masuk wilayah suatu Negara. Tidak boleh ada orang yang bisa dengan sesukanya keluar masuk dalam suatu wilayah Negara, baik itu warga Negeranya maupun orang asing yang akan memasuki wilayah Negara lain.

Kebijakan ini tentu berdampak bagi banyak orang, tidak saja bagi warga Negara namun juga bagi orang asing yang hendak memasuki suatu wilayah Negara, tidak terkecuali para pengungsi internasional yang sedang berada di suatu Negara untuk mendapatkan perlindungan atau yang baru akan mencari perlindungan di suatu Negara. Akibat adanya lock down yang ditetapkan di sejumlah Negara tentu saja sangat berdampak terhadap para pengungsi internasional ini.

Pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*) yang selanjutnya disebut pengungsi pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia maupun belahan dunia lainnya tidak menjadi kelompok yang cukup mendapatkan penanganan. Hal ini mengingat fakta bahwa warga dari suatu negara saja seringkali tidak tertangani dengan baik. Pada masa pandemi COVID-19, pengungsi menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengingat banyak faktor yang memengaruhinya. Dari segi jumlah, total pengungsi global mencapai 70,8 juta (UNHCR, 25 April 2020). Jumlah tersebut terdiri dari 41,3 juta *internally displaced peoples* (IDPs) atau pengungsi internal negara; 25,9 juta pengungsi (antarnegara); 3,5 juta pencari suaka; dan termasuk di dalamnya 3,9 juta pengungsi tanpa warga negara.¹

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperkirakan lebih dari 6,6 juta orang tinggal di berbagai kamp di seluruh dunia. Mereka adalah sebagian besar dari populasi pengungsi global, yang diperkirakan mencapai sekitar 26 juta, dan ada Sekitar dua juta orang yang menetap di kamp-kamp buatan sendiri yang biasanya dibuat dari bahan-bahan lokal yang sangat sederhana. Namun, sebagian dari mereka harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hidup dan melindungi diri dari penyakit COVID-19 yang menular. Mereka juga hidup dalam komunitas yang padat dan tidak mendapatkan akses bantuan sosial dan ekonomi.

¹ Politik Internasional, Kerentanan Pengungsi Pada masa pandemi Covid -19 di Indonesia <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1384-kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia>, akses 3 Juni 2020

Populasi pengungsi yang jumlahnya terus meningkat, Padatnya penghuni dan kondisi kamp yang kotor menjadikan saran kesehatan yang bertujuan menghentikan penyebaran virus COVID-19 tidak berguna bagi para pengungsi, himbauan pemerintah untuk menjaga jarak aman dan sering mencuci tangan sangat tidak praktis bagi para pengungsi. Kekhawatiran terus meningkat bahwa ketika virus itu mencapai kamp-kamp yang tersebar di dunia, bencana besar akan timbul².

Seringkali, bukan karena kamp pengungsi memiliki sistem kesehatan yang lemah, yang diperingatkan para ahli akan dibanjiri oleh COVID-19, tetapi karena mereka tidak memiliki sistem kesehatan sama sekali. Menurut catatan Foreign Policy, di seluruh kawasan, kelompok-kelompok bantuan berupaya meningkatkan distribusi sabun, air, dan informasi tentang virus. Di Irak, tempat 1,5 juta orang menjadi pengungsi, kamp-kamp terus disemprot dengan disinfektan. Warga Irak di kamp-kamp melakukan upaya terbaik yang bisa mereka lakukan untuk mengikuti pedoman kesehatan. *Foreign Policy* melaporkan, badan pengungsi PBB telah meluncurkan permohonan senilai US\$33 juta untuk menangani krisis, tetapi begitu banyak negara yang biasanya menyumbang kini tengah berjuang untuk menahan wabah di wilayah mereka sendiri.³

Para pengungsi akan menghadapi persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sumber daya medis darurat karena organisasi seperti Dokter Lintas Batas (DWB), yang biasanya membantu kelompok yang paling rentan di dunia, telah mengirim tim ke pusat-pusat pandemi COVID-19 seperti Italia.

Di tengah persaingan untuk sumber daya kesehatan global, para pengungsi kemungkinan akan kalah dan terabaikan. Bahkan dengan bantuan dan pasokan medis yang disumbangkan ke beberapa negara, tidak jelas berapa banyak yang akan mengalir ke para pengungsi. Organisasi non-profit Inggris Oxfam menggambarkan situasi di salah satu kamp di negara bagian Rakhine yang kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan bahkan dalam keadaan sekarang ini. Jika ada yang sakit dan butuh perawatan dari spesialis, mereka harus meminta izin resmi yang bisa memakan waktu beberapa hari. Lalu mereka harus membayar pengawalan keamanan untuk pergi ke rumah sakit. IOM mengatakan jika ada kasus virus COVID-19 di antara para pengungsi, hal itu bisa tetap tidak terdeteksi dan karenanya akan menimbulkan risiko bagi migran yang tinggal bersama mereka dan penduduk setempat.

Penduduk setempat memiliki akses ke perawatan medis yang tidak tersedia bagi mereka yang tinggal di akomodasi informal. IOM sedang berupaya membangun fasilitas medis sebanyak mungkin. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan sedang bekerja dengan berbagai pemerintah dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang rentan. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengatakan sejauh ini belum menerima informasi tentang epidemi virus COVID-19 di kamp-kamp pengungsi. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu faktor alasan utama penulis untuk membahas mengenai bentuk kebijakan perlindungan oleh Negara dengan bekerjasama dengan *United Nation High Commission of Refugee* (UNHCR) dan *Non-Government Organization* (NGO) bagi para pengungsi di tengah masa pandemi global COVID-19. Tulisan ini fokus pada bentuk perlindungan Negara bagi pengungsi di tengah masa pandemic global COVID-19.

² <https://majalah.tempo.co/read/internasional/160353/bagaimana-wabah-corona-mengancam-kamp-kamp-pengungsi>, akses 3 Juni 2020

³ Fadhila eka ratnasari dan Purnama ayu rizky, "Nasib miris pengungsi di tengah wabah corona" (<https://www.matamatapolitik.com/nasib-miris-pengungsi-di-tengah-wabah-corona-timur-tengah-in-depth/>, diakses pada 8 Mei 2020)

2. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode Pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).⁴ Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan penanganan pengungsi. Selain menggunakan *statue approach*, digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*).⁵

3. Pengungsi Internasional

Pengungsi adalah orang-orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiyaan karena alasan rasa, agama, kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok social tertentu atau pendapat politiknya, berada diluar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut; atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya, tidatersebut tidak ingin kembali kenegaranya.⁶

Menurut Konvensi 1951, seseorang baru dapat dikatakan sebagai pengungsi apabila adanya unsur 'rasa takut' yang sangat akan persekusi (penganiyaan) berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada salah satu organisasi ataupun karena pendapat politiknya' dan mereka telah berada diluar wilayah begara dimana mereka bertempat tinggal, karena mereka tidak ingin mendapatkan perlindungan dari Negara tersebut. Hal ini menjadi landasan UNHCHR untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori yang pengungsi atau tidak.⁷

Memang definisi dari pengungsi menurut konvensi 1951 itu berbeda dengan definisi pengungsi pada umumnya, karena yang dimaksud dalam konvensi 1951 ini adalah orang- orang yang meminta perlindunga karena adanya ancaman keselamatan jiwanya terancam, disebabkan karena alasan-alasan yang telah disebutkan di paragraph sebelumnya, selain itu Pengungsi 1951 adalah pengungsi yang akan berada dalam pengawasan dan perlindungan UNHCR karena itu biasa juga disebut sebagai pengungsi mandat. Sehingga jika kita berbicara tentang pengungsi disini, sudah pastilah yang dimaksud adalah orang yang keluar atau meninggalkan negaranya dan pergi mencari perlindungan ke Negara lain.

Dalam pelaksanaanya tugasnya, UNHCR seringkali memunculkan istilah Pegungsi Mandat dan Pengungsi Konvensi. Dimana Pegungsi Mandat adalah untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi wewenang atau mandate yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR seperti orang orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR, dimanapun mereka berada, sebelum berlakunya Konvensi 1951 dan/atau sebelum berlakunya Protocl 1967 dan Orang- orang yang diakui sebagai Pengungsi oleh UNHCR yang berada di luar Negara-

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 96

⁵ *Ibid.*, hlm. 137

⁶ Pasal 1 Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi, lihat juga dalam Iin Karita Sakharina, Pengungsi dan HAM, Jurnal Hukum Internasional, No.2, Nopember 2013, hlm198

⁷ Achmad Romsan, dkk, 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, hlm. 22

Negara Pihak pada Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967. Sementara yang dimaksud Pengungsi Statuta adalah untuk menunjuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah Negara- Negara Pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh Negara-negara pihak konvensi 1951 dan Protokol 1967.⁸ Jadi dua istilah yang digunakan oleh UNHCR untuk menentukan status pengungsi hanya untuk membedakan saja UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi internasional ini, yaitu berdasarkan mandate yang diberikan kepada UNHCR untuk melindungi pengungsi internasional sebelum adanya Konvensi 1951 dan perlindungan yang diberikan oleh UNHCR setelah adanya Konvensi 1951 terhadap pengungsi internasional sebagai salah satu badan khusus PBB yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengurus masalah pengungsi internasional ini.

4. Mekanisme Perlindungan Internasional

Kesadaran masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan dalam menyelesaikan masalah pengungsi dimulai sewaktu terjadi revolusi di Rusia dan runtuhnya kekaisaran Otoman yang mengakibatkan terjadinya pengungsian secara besar-besaran. Tidak kurang 1,5 juta orang Rusia yang mengungsi ke Negara lain di Eropa, untuk merespon masalah ini maka pada tahun 1921, Liga Bangsa-Bangsa menunjuk Dr. Frijtof Nansen sebagai orang pertama yang menjabat di Komisi Tinggi untuk Pengungsi, bertugas antara lain mengidentifikasi status hukum para pengungsi Rusia ini serta mengorganisir untuk repatriasi mereka ke Negara yang mau menerima para pengungsi Rusia. Agar mereka mendapat perlindungan dan disebut Nansen passport.⁹

Dari pemamparan diatas bisa dilihat bahwa pengungsi adalah persoalan yang sudah sejak beberapa abad yang lalu, terlihat bahwa dimasa sebelum terjadinya Perang Dunia ke 2 dan pada saat Liga Bangsa-Bangsa masih ada, walaupun keberadaan Liga Bangsa-bangsa tidak lah lama, namun tetap sempat membentuk Komisi Tinggi Untuk mengurus masalah Pengungsi.

Kemudian setelah selesainya Perang dunia kedua awal tahun 1945,lalu masyarakat sepakat mendirikan Organisasi masyarakat dunia untuk mengawal perdamaian didunia karena Perang Dunia ke dua adalah perang terpanjang sepanjang masa dan terbukti tidak hanya banyak memakan korban namun juga penderitaan dan kesengsaraan selama perang berlangsung dan setelahnya, karena itulah maka masyarakat internasional sepakat untuk tetap menjaga perdamaian dunia dengan mendirikan Organisasi Masyarakat dunia, yang disebut dengan United Nation (UN) atau Persatuan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Kemudia karena persoalan pengungsi masih saja berlangsung maka PBB mendirikan satu badan khusus untuk urusan pengungsi yang disebut the United Nation High Commisioner for refugees (UNHCR).

UNHCR adalah lembaga kemanusiaan non politik, yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1950 dan memulai operasinya pada 1 Januari 1951. Mendapat mandate untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi dan mengusahakan penyelesaian jangka panjang terhadap masalah mereka. UNHCR melaksanakan mandatnya dengan bekerjasama dengan Pemerintah, tergantung pada

⁸ Achmad Romsan, dkk, op cit, hlm 30-31

⁹ Achmad Romsan, dkk,op cit hlm 63

persetujuan dari Pemerintah yang bersangkutan dan dengan organisasi –organisasi swasta.¹⁰

Kegiatan / aktifitas perlindungan UNHCR termasuk¹¹ ;

1. Mempromosikan akses terhadap dan implementasi dari konvensi dan hukum pengungsi
2. Menjamin bahwa para pengungsi diperlakukan sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku;
3. Menjamin bahwa para pengungsi diberikan suaka dan tidak dikembalikan pulang secara paksa ke negara yang mereka tinggalkan
4. Mempromosikan prosedur yang tepat untuk menentukan apakah seseorang adalah seorang pengungsi atau bukan berdasarkan definisi pada Konvensi 1951 dan berdasarkan definisi yang terdapat di beberapa konvensi regional;
5. Membantu pengungsi dalam mencari solusi atas masalah mereka, seperti pemulangan kembali secara sukarela, integrasi lokal, penempatan ke Negara ketiga; dan
6. Membantu mempersatukan kembali mereka yang kembali ke rumah (*returness*) dan memberikan perlindungan dan bantuan, apabila diminta, kepada pengungsi internasional.

Selain itu, dalam upaya menjamin perlakuan manusiawi terutama bagi kelompok rentan, hukum pengungsi internasional dihubungkan dengan HAM internasional yang focus untuk menjaga martabat kesejahteraan masing-masing individu. Kedua perangkat hukum ini saling melengkapi dimana prinsip HAM ini sering digunakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pengungsi, yaitu :

- a. Untuk meningkatkan fasilitas bagi pengungsi dan pencari suaka menurut HAM internasional di Negara suaka
- b. Memantau pelaksanaan hukum HAM yang benar dalam penggunaannya oleh dan atas nama individu pengungsi laki, perempuan, anak-anak dalam mekanisme internasional
- c. Dalam bagaimana hukum HAM internasional mempengaruhi kebijakan UNHCR, misalnya dalam menentukan standar prosedur, keadaan, tempat-tempat penahanan, kesetaraan gender dan hak-hak anak.¹²

Perlindungan Internasional terhadap pengungsi memang memperhatikan aspek HAM karena pengungsi adalah juga individu atau kelompok orang yang tentunya memiliki hak asasi yang sama dengan individu atau kelompok orang lainnya sehingga dalam menangani pengungsi maka penghormatan dan perlindungan HAM terhadap pengungsi harus tetap dijamin. Terutama karena pengungsi adalah individu atau kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM nya baik dalam bentuk kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi.

¹⁰ UNHCR&LSM,2003. Melindungi Pengungsi, Cetakan ke-2..E.99.0.22.ISBN 92-1-101005-5.hlm22

¹¹ *ibid*, hal 24

¹² lihat Iin Karita Sakharina,dkk,2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pencari Suaka & Pengungsi Internasional. Cetakan Ke satu, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 146-147

5. Bentuk Perlindungan Negara Bagi Pengungsi di tengah Masa Pandemi Global COVID-19

Negara dan UNHCR sebagai aktor penting dalam memberikan perlindungan internasional wajib mengimplementasikannya terhadap objek dimaksud. Ada 4 (empat) kategori orang yang membutuhkan perlindungan internasional, keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- (1) Refugees and asylum-seekers,
Under UNHCR's mandate, a refugee is any person who is outside his or her country of origin or habitual residence and is unable or unwilling to return there owing to :
 - (a) *A well-founded fear of persecution for one of the reasons set out in the 1951 Convention*
 - (b) *Serious and indiscriminate threats to life, physical integrity or freedom resulting from generalized violence or events seriously disturbing public order*
 - (c) *An asylum-seeker is an individual who is seeking international protection whether as on individual or on a group basis. In countries with individualized procedures, an asylum-seeker is someone whose claim has not yet been finally decided on by the country in which he or she has submitted it. Not every asylum-seeker will ultimately be recognized as a refugee, but every refugee is initially an asylum-seeker*
- (2) Returnees (Orang-Orang yang Kembali)
- (3) Stateless Person (Orang Tanpa Kewarganegaraan)
- (4) Internally Displaced Peoples (IDPs)

Sejak melindungi pengungsi sebagai tanggung jawab Negara, kerjasama antara negara dan UNHCR sangat penting. Pemerintah bekerja dengan UNHCR dalam berbagai cara, misalnya dengan pemberian suaka sesuai dengan kewajiban internasional mereka dan dengan menyediakan dana untuk operasi UNHCR di seluruh dunia. UNHCR memastikan bahwa Negara menjunjung tinggi komitmen mereka untuk melindungi pengungsi, misalnya, memantau praktik nasional, intervensi atas nama pengungsi individu bilamana pemerintah diperlukan dan membantu untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan suaka. Di beberapa negara, ini mungkin berarti bahwa UNHCR menilai klaim suaka individu. UNHCR juga bekerja dengan organisasi organisasi antar-pemerintah ditingkat regional, seperti Uni Afrika, Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara Amerika, untuk menyelaraskan dan meningkatkan penyediaan perlindungan internasional di daerah mereka.

Walaupun UNHCR adalah lembaga satu-satunya organisasi PBB yang khusus menangani masalah perlindungan pengungsi, badan-badan PBB lainnya seringkali juga bekerja sama dengan UNHCR. Antara lain yaitu:¹⁴

- a) World Food Programme (WFP)- Badan Pangan Dunia merupakan penyalur utama pengiriman bantuan makanan,
- b) United Nations Children's Fund (UNICEF) – Badan PBB untuk anak-anak, yang membantu pemerintah dengan program yang terfokus pada kesehatan anak-anak, nutrisi, pendidikan, pelatihan, dan pelayanan social. UNICEF juga memainkan suatu peran penting dalam perlindungan anak yang terpisah dan mempertemukan kembali keluarganya yang mungkin terpisah saat mereka meninggalkan Negara asalnya;

¹³ Iin Karita Sakharina & Kadaruddin, 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri)*, Deepublish, Jogjakarta. Hlm 41-43

¹⁴ UNHCR & LSM, 2003, Op cit, hlm 24

- c) United Nations Development Program (UNDP) – Badan PBB untuk program pengembangan yang mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dibawah system PBB, rencana-rencana pengembangan jangka panjang setelah fase darurat selesai dan berperan penting dalam program-program integrasi dan re integrasi
- d) United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)-Komisariat Tinggi PBB untuk HAM yang berperan memimpin isu HAM dan menegakkan pentingnya HAM baik ditingkat internasional maupun nasional, mengkoordinir kegiatan HAM melalui system PBB, dan menanggapi pelanggaran-pelanggaran keras terhadap HAM.

Di tengah Wabah pandemic Global COVID-19 yang hamper seluruh Negara di dunia terkena dampaknya baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan Sektor Pengungsi di negara itu sendiri. Sehingga sejumlah Negara guna memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19 menerapkan aturan / kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO yaitu dengan metode “*Lockdown*” atau “*Physical Distancing*”. Dimana penerapannya tidak hanya bagi warga Negara itu saja melainkan Termasuk aspek *Refugee*/Pengungsi didalamnya.

Berdasarkan data GLOBAL COVID-19 EMERGENCY RESPONSE yang dikeluarkan oleh UNHCR pada tanggal 11 Mei 2020, berikut beberapa kebijakan/langkah partisipasi Negara-negara bekerjasama dengan UNHCR dalam melindungi Pengungsi di tengah wabah pandemi ini:¹⁵

1. **Ukraina**

Sebagai hasil dari advokasi dengan Vodafone Ukraina, orang-orang yang terpengaruh konflik di Donetska dan Luhanska dekat "kontak" dapat menerima top-up kredit telepon gratis untuk memungkinkan akses yang lebih baik ke informasi penting. Upaya serupa untuk meningkatkan konektivitas orang yang peduli sedang dilakukan di Indonesia dan negara lain, misalnya di Serbia dan Spanyol.

2. **Perancis**

Di Prancis, jaringan relawan pengungsi adalah bekerja dengan UNHCR dan LSM untuk mempromosikan aktivitas virtual untuk orang yang berkepentingan menjaga ikatan sosial selama karantina.

3. **Yordania**

Di Yordania, UNHCR telah mendukung Kementerian Pendidikan dalam upaya meluncurkan secara online dua platform pembelajaran yang memungkinkan para pengungsi dan komunitas setempat untuk mengakses kesempatan pembelajaran online. Dalam pertimbangan hambatan dari segi keuangan untuk mengakses materi secara online, kedua platform pembelajaran tersebut telah digratiskan oleh operator ponsel di Yordania.

4. **Irak**

Di Irak, Pertolongan Pertama Psikologis pelatihan dilakukan untuk tingkat dasar tenaga kesehatan, training manajemen bagi staf LSM dan relawan pengabdian masyarakat.

5. **Malawi**

Untuk mendukung akses berkelanjutan pendidikan selama *Lockdown*, UNHCR bekerjasama dengan unit pendidikan di Malawi telah menyediakan komputer laptop dan paket data internet tiap 15 siswa dan enam guru yang terlibat dalam

¹⁵ UNHCR Global Covid-19 Emergency Response, 11 Mei2020 <https://reliefweb.int/report/world/unhcr-global-covid-19-emergency-response-11-may-2020> akses 3 Juni 2020

mendukung program Inklusi Digital pendidikan tinggi sehingga mereka dapat melanjutkan studi mereka secara online selama penutupan sekolah.

6. Malaysia

Sebagai Negara transit UNHCR bekerjasama dengan mitra dan Kelompok masyarakat yang dipimpin oleh para pengungsi di Indonesia-Malaysia untuk memperluas ketersediaan layanan hotline, psiko-sosial daring untuk mendukung dan membangun fokus komunitas. Hal ini juga berfungsi untuk mendukung akses kesehatan lini kedua perawatan terutama untuk pengiriman anak dan kasus darurat seperti sekarang banyak pengungsi yang tidak mampu untuk membayar layanan kesehatan di tengah masa pandemic.

7. Somalia

Di Somalia, kluster Perlindungan memperkuat pemantauan IDP-nya dengan kuesioner yang mencakup risiko yang dapat dipicu atau diperburuk oleh situasi COVID-19. Kuesioner mencakup risiko yang terkait dengan kekerasan, pembatasan pergerakan dengan sewenang-wenang, pengusuran, akses memperoleh bantuan, dan akan digunakan untuk menginformasikan respons terhadap langkah-langkah yang dapat membantu para pengungsi / IDPs.¹⁶

8. Belanda

sebagai negara penerima, menerima secara terbuka para pengungsi dengan tetap mempekerjakan para pengungsi secara sukarela dan warga negaranya terbuka untuk para pengungsi, mereka menyambut baik inisiatif para pengungsi dan mengaku senang mereka menunjukkan kebajikannya ke seluruh desa, hal ini menjadi poin penting dimana bisa terjalin komunikasi dan hubungan yang baik di tengah masa pandemi ini.

9. Turki

Sebagai Negara penerima memberikan bantuan kepada para pengungsi seperti jika pengungsi Suriah memiliki gejala, mereka harus menelepon *hotline* Kementerian Kesehatan Turki dan meminta penerjemah bahasa Arab, kementerian menerbitkan panduan dalam bahasa Arab di situs webnya, agar warga dapat mengambil langkah-langkah pribadi yang mungkin dapat memutus rantai penularan Covid-19. Turki memberikan akses pelayanan kesehatan yang sama bagi warga negaranya dan para pengungsi, Turki juga membuka rumah sakit lapangan di sepanjang perbatasan Yunani untuk melacak indikator kesehatan para pengungsi.

Namun, ada beberapa Negara penerima yang menerapkan aturan sementara untuk tidak menerima pengungsi bahkan memberikan kesempatan bagi pengungsi untuk dikembalikan dari Negara, seperti Yunani, Jerman dan beberapa Negara di Uni Eropa. Hal ini disebabkan karena makin memburuknya keadaan di tengah wabah pandemic COVID-19 di daratan Eropa.

Berikut ini merupakan pertimbangan hukum utama, berdasarkan pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia, tentang akses ke wilayah bagi orang yang mencari perlindungan internasional dalam konteks langkah-langkah yang diambil oleh Negara untuk membatasi masuknya warga non-nasional untuk perlindungan kesehatan masyarakat sebagai tindakan pencegahan dalam masa pandemi COVID-19. Untuk menegaskan kembali bahwa sementara ini Negara dapat memberlakukan tindakan yang mungkin termasuk pemeriksaan kesehatan atau pengujian orang yang mencari perlindungan internasional pada saat masuk dan / atau menempatkan mereka dalam

¹⁶ UNHCR Data Global COVID-19 Emergency Response, 11 May 2020

karantina, tindakan tersebut tidak dapat mengakibatkan mereka tidak diberi kesempatan yang efektif kesempatan yang efektif untuk mencari suaka atau menghasilkan *refoulement*:

1. Di bawah hukum internasional, Negara memiliki kekuatan berdaulat untuk mengatur masuknya orang non-nasional. Namun, hukum internasional juga menetapkan bahwa langkah-langkah untuk efek ini mungkin tidak mencegah mereka mencari suaka dari penganiayaan.¹⁷
2. Inti dari hak untuk mencari suaka adalah prinsip non-*refoulement*,¹⁸ yang melarang, tanpa diskriminasi,¹⁹ Setiap tindakan Negara yang mengarah pada “pengembalian dengan cara apa pun” ke wilayah asing yang tidak aman, termasuk penolakan di perbatasan atau tidak masuk ke wilayah tersebut.
3. Negara-negara bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan dari *refoulement* kepada semua orang yang berada dalam yurisdiksinya, termasuk di perbatasan-perbatasan nasional.²⁰ Untuk memberikan efek pada kewajiban hukum internasional termasuk hak untuk mencari suaka dan prinsip non-*refoulement*, Negara memiliki tugas *vis-à-vis* dimana untuk orang-orang dalam hal ini pengungsi yang telah tiba di perbatasan mereka, agar dilakukan penyelidikan independen tentang kebutuhan orang-orang akan butuh perlindungan internasional dan untuk memastikan mereka tidak berisiko terkena *refoulement*.²¹ Jika risiko semacam itu ada, Negara dihalangi untuk menolak masuk atau secara paksa memindahkan orang yang bersangkutan.²²
4. Pada awalnya, orang yang mencari perlindungan internasional harus memiliki akses memperoleh informasi yang relevan dalam bahasa yang mereka pahami dan kemampuan untuk membuat klaim suaka formal dengan otoritas yang kompeten. Selanjutnya, orang yang mencari perlindungan internasional harus diberi kesempatan untuk menghubungi UNHCR. Bersamaan dengan itu, sesuai dengan mandatnya,²³ UNHCR harus diberikan kesempatan pada penerapan kesempatan memperoleh perlindungan kesehatan dengan langkah-langkah yang diambil oleh

¹⁷ Article 14 of the *Universal Declaration of Human Rights* provides that '[e]veryone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution'. The right to seek and enjoy asylum is affirmed in various regional legal instruments: Organization of American States, *American Declaration on the Rights and Duties of Man*, 2 May 1948, Article XXVII, www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3710.html, referring to the right to seek and receive asylum. Organization of American States, *American Convention on Human Rights*, "Pact of San Jose", Costa Rica, 22 November 1969, Article 22(7), www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36510.html,

¹⁸ The principle of *non-refoulement* prohibits states from expelling or returning a refugee in any manner whatsoever to a territory where she or he would be at risk of threats to life or freedom. The principle of *non-refoulement* is most prominently expressed in Article 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (*Convention Relating to the Status of Refugees* (28 July 1951) 189 UNTS 137), having been recognized as a norm of customary international law.

¹⁹ According to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, note 3 above, Article 3, '[t]he Contracting States shall apply the provisions of this Convention to refugees without discrimination as to race, religion or country of origin'.

²⁰ ExCom Conclusion No. 6 (XXVIII), 1977, para. (c); ExCom Conclusion No. 22 (XXXII), 1981, para. II.A.2; ExCom Conclusion No. 81 (XLVIII), 1997, para. (h); ExCom Conclusion No. 82 (XLVIII), 1997, para. (d)(ii); ExCom Conclusion No. 85 (XLIX), 1998, para. (q).

²¹ UNHCR, *UNHCR intervention before the Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region in the case between C, KMF, BF (Applicants) and Director of Immigration, Secretary for Security (Respondents)*, 31 January 2013, Civil Appeals Nos. 18, 19 & 20 of 2011, paras. 74-75, www.refworld.org/docid/510a74ce2.html. The "duty of independent inquiry" has been recognized by various courts: *Hirsi Jamaa and Others v. Italy*, Application no. 27765/09, Council of Europe: European Court of Human Rights, 23 February 2012, paras. 146-148, www.refworld.org/docid/4f4507942.html;

²² UNHCR, Note on Non-*Refoulement* (EC/SCP/2), 1977, para. 22

²³ UN General Assembly, *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*, 14 December 1950, A/RES/428(V), available at: www.refworld.org/docid/3ae6b3628.html. UNHCR, *Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and his Office*, October 2013, www.refworld.org/docid/5268c9474.html.

pihak berwenang, untuk menghubungi dan mengunjungi orang-orang tersebut untuk menilai dan mengawasi keadaan mereka dan memberikan bantuan bila diperlukan.²⁴

Maka dari itu, dalam hal perlindungan Negara dalam hali ini baik Negara Penerima, Negara Transit, atau Negara yang meratifikasi Konvensi 1951, berhak mengambil langkah-langkah untuk memastikan dan mengelola risiko bagi kesehatan masyarakat, termasuk risiko yang bisa timbul sehubungan dengan orang asing atau pengungsi yang tiba di perbatasan mereka, namun Langkah-langkah tersebut harus non-diskriminatif dan juga harus proporsional dan masuk akal untuk tujuan melindungi kesehatan masyarakat.

Menanggapi pandemi COVID-19, Negara-negara baik yang telah atau sedang mempertimbangkan untuk dapat menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan bagi kesehatan masyarakat di negaranya, seperti melakukan pemeriksaan kesehatan bagi wisatawan pada saat kedatangan dan pemberlakuan karantina untuk orang yang telah diidentifikasi menderita penyakit atau yang mungkin telah terpapar virus COVID-19. Upaya-upaya semacam itu berfungsi multilateral atau nasional dengan tujuan diarahkan untuk mengendalikan penyakit menular ini dan mencegah penyebarannya.

6. Penutup

Pandemi tidak hanya menantang sistem kesehatan global, tetapi juga menguji kemanusiaan kita bersama. Yang terburuk mungkin belum datang, terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara yang dilemahkan oleh konflik dan ketidakstabilan politik. Ketika mempertimbangkan kemungkinan dampak yang lebih luas dari wabah infeksi di komunitas tuan rumah, dukungan ke kamp pengungsi atau pemukiman dan tuan rumah mereka, atau bagi para pengungsi di perkotaan, adalah kepentingan semua orang. Dalam melihat Situasi dan kondisi para pengungsi di tengah masa pandemic COVID-19 ini yang berbeda-beda dimulai dari negara transit hingga negara penerima atau negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951. Sama halnya dengan cara merespon dan pemberian perlindungan dari negara-negara bersangkutan juga di dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dari Negara masing-masing.

Diperlukan kerjasama antarnegara dengan UNHCR selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam melindungi, memantau, mengawasi para pengungsi/imigran atas dasar kemanusiaan untuk pemberian perlindungan yang bukan hanya bagi warga Negara setempat melainkan juga bagi para pengungsi. Pengungsi berkontribusi terhadap respon pandemi, dan dukungan untuk upaya mereka dalam perlindungan dan penjangkauan terutama untuk yang paling rentan di komunitas mereka dapat diupayakan maksimal. Para pengungsi juga berhak untuk diberikan bantuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun hak untuk memperoleh perawatan dengan fasilitas kesehatan yang baik apabila dalam keadaan yang kurang sehat atau terjangkit virus di tengah wabah pandemic COVID-19 dibawah pengawasan UNHCR di negara

²⁴ ExCom Conclusion No. 22 (XXXII), 1981, para. III. EXCOM Conclusion No. 33 (XXXV), 1984, para. (h). EXCOM Conclusion No. 72 (XLIV), 1993, at para. (b). EXCOM Conclusion No. 73 (XLIV), 1993, at para. (b) (iii). EXCOM Conclusion No. 79 (XLVII), 1996, at para. (p). See also UNHCR, *Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and his Office*, October 2013, p. 7, www.refworld.org/docid/5268c9474.html, setting out UNHCR's mandate.

penerima, negara transit atau negara yang ikut meratifikasi konvensi pengungsi 1951 atas dasar Kemanusiaan dan tanpa ada diskriminasi antar golongan atau status kemanusiaan. Sebaiknya, perlindungan pengungsi juga menjadi pusat dari respons dalam konteks COVID-19, sebagaimana Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa orang-orang (pengungsi) dan hak-hak mereka harus di depan dan di tengah. Dengan menghormati hak asasi manusia, dengan cara membangun respons yang lebih baik untuk masa pandemic keadaan darurat COVID-19 serta memberikan solusi untuk pemulihan dalam jangka panjang.

Referensi

- Achmad Romsan, dkk, 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta.
- Fadhila Eka Ratnasari dan Purnama Ayu Rizky, "Nasib miris pengungsi di tengah wabah corona" <https://www.matamatapolitik.com/nasib-miris-pengungsi-di-tengah-wabah-corona-timur-tengah-in-depth>
- Iin Karita Sakharina & Kadaruddin, 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan Pengungsi Dalam Negeri)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Iin Karita Sakharina, 2013. Pengungsi dan HAM, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 2: 198-221
- Iin Karita Sakharina, dkk, 2017 *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pencari Suaka & Pengungsi Internasional*. Cetakan Ke satu, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Politik Internasional, Kerentanan Pengungsi Pada masa pandemi Covid -19 di Indonesia <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1384-kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia>
- Tempo.com <https://majalah.tempo.co/read/internasional/160353/bagaimana-wabah-corona-mengancam-kamp-kamp-pengungsi>
- UN General Assembly, *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*, 14 December 1950, A/RES/428(V), available at: www.refworld.org/docid/3ae6b3628.html.
- UNHCR & LSM, 2003. *Melindungi Pengungsi*, Cetakan kedua. E.99.0.22.ISBN 92-1-101005-5.
- UNHCR Global Covid-19 Emergency Response, 11 Mei 2020 <https://reliefweb.int/report/world/unhcr-global-covid-19-emergency-response-11-may-2020>